

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Tahun 2015 bermakna penting dan strategis bagi penyelenggaraan pembangunan Provinsi Jawa Barat yang berkelanjutan, dan menjadi media komunikasi pertanggungjawaban kinerja pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat. Penyelenggaraan pembangunan Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2015 telah mewujudkan sinergitas dan harmonisasi antara lembaga eksekutif, lembaga legislatif, peran dan partisipasi komunitas masyarakat dan pelaku usaha serta para akademisi guna meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan hidup masyarakat. Berbagai capaian kinerja telah diraih dalam penyelenggaraan pembangunan Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2015 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan beberapa indikator kinerja pembangunan daerah, sebagai berikut: (1) Indikator Kesejahteraan Masyarakat, (2) Indikator *Good Governance*, (3) Indikator Pelayanan Dasar, dan (4) Indikator Daya Saing Daerah, serta (5) Posisi Kinerja Jawa Barat dalam Konstelasi Nasional.

#### **(1) Kesejahteraan Masyarakat**

Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia, sebesar 46,70 juta jiwa pada Tahun 2015. Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat, kondisi penduduk Jawa Barat menjadi potensi dan tantangan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat yang telah dilaksanakan pada Tahun 2015, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah mencapai keberhasilan dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk (LPP) dari 1,52% pada Tahun 2014 menjadi 1,47% Tahun 2015. Selain itu, capaian keberhasilan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Jawa Barat diwujudkan melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat dari 68.80 poin pada Tahun 2014 menjadi 69.49 poin pada Tahun 2015. Keberhasilan dalam peningkatan IPM Jawa Barat ditopang oleh keberhasilan dalam pencapaian Indeks Pendidikan sebesar 60.45 poin, Indeks Kesehatan sebesar 80.80 poin dan Indeks Daya Beli sebesar 68.69 poin pada Tahun 2015.

Beberapa indikator pembangunan pembangunan yang menunjukkan keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat pada Tahun 2015, antara lain: pencapaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di atas 5%; pencapaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan sebesar Rp.1.207,00 triliun; pengendalian jumlah penduduk miskin menjadi 9,57%; dan pengendalian Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 8.72%.

## **(2) Good Governance.**

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan tata pemerintahan daerah yang *good governance*. Pencapaian keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan pembangunan tata pemerintahan daerah pada Tahun 2015, berdasarkan spirit di atas ditunjukkan dalam pencapaian Indikator *Good Governance*, yang dibangun oleh 3 (tiga) komponen dasar, yaitu : partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi.

Pertama, dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya untuk melibatkan seluruh stakeholders pembangunan Jawa Barat berdasarkan pendekatan 'Jabar Masagi', yang ditandai dengan adanya dukungan dan keterlibatan yang nyata dari unsur-unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha dan komunitas masyarakat di Jawa Barat. Dukungan dan keterlibatan unsur-unsur 'Jabar Masagi' dalam penyelenggaraan pembangunan Jawa Barat dari ruang lingkup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan serta pengendalian kegiatan pembangunan Jawa Barat. Dalam ruang lingkup perencanaan pembangunan Jawa Barat partisipasi masyarakat telah diwadahi melalui penyelenggaran Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang dalam wujud musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkatan desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, wilayah, provinsi hingga nasional; serta implementasi Sistem Informasi Manajemen RKPD Jabar Online 2101. Kedua media tersebut telah memberikan tempat bagi komunitas atau kelompok masyarakat untuk menyampaikan berbagai usulan kebutuhan dalam rencana pembangunan di suatu wilayah atau daerah.

Selanjutnya dalam ruang lingkup pelaksanaan pembangunan Jawa Barat partisipasi masyarakat telah diwadahi melalui penyelenggaraan pembangunan masyarakat atau kelompok masyarakat/lembaga masyarakat berbasis pada anggaran bantuan sosial (bansos) atau bantuan hibah. Penyelenggaraan pembangunan masyarakat atau kelompok masyarakat/lembaga masyarakat dengan pendekatan ini telah memberikan tempat bagi masyarakat atau kelompok masyarakat/lembaga masyarakat secara aktif, mandiri, gotong-royong dan bertanggungjawab untuk mengimplementasikan usulan-usulan kebutuhan dalam rencana pembangunan di suatu wilayah atau daerah.

Demikian juga dalam ruang lingkup pengawasan dan pengendalian pembangunan Jawa Barat partisipasi masyarakat telah diwadahi melalui penyelenggaraan pengawasan pembangunan Jawa Barat dengan melibatkan peran dan partisipasi masyarakat atau kelompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakat secara bertanggungjawab. Penyelenggaraan pengawasan pembangunan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakat dengan pendekatan ini telah memberikan tempat bagi masyarakat atau kelompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakat secara aktif, professional, mandiri dan

bertanggungjawab untuk mengawasi jalannya berbagai kegiatan implementasi pembangunan pada suatu wilayah atau daerah di Jawa Barat.

Gambaran pencapaian keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di Jawa Barat melalui perwujudan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Jawa Barat pada Tahun 2015 tercermin melalui tingkat partisipasi masyarakat Jawa Barat dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Jawa Barat, yang berdasarkan evaluasi dinilai cukup berhasil dengan tingkat partisipasi sebesar 62,58% dari target yang direncanakan sebesar 63%. Selanjutnya gambaran pencapaian keberhasilan tersebut juga diperkuat dengan capaian keberhasilan tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang politik yang diwujudkan dari pencapaian indeks demokrasi di Jawa Barat sebesar 65,18% yang dinilai mencerminkan kondisi yang baik.

Kedua, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya untuk menyelenggarakan sistem pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang taat dan patuh terhadap semua ketentuan peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan daerah yang berlaku. Selanjutnya, dengan didukung oleh sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi computer dan SDM pengelola keuangan daerah yang professional, maka semakin mewujudkan akuntabilitas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terutama dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan kondisi yang tersebut, maka pada Tahun 2015 Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mendapatkan opini "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)" dari BPK RI selama empat kali, dengan capaian tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah. Selain itu, dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mendapatkan penghargaan "Anugerah TEPPA" dengan predikat terbaik 2 (dua) Tingkat Nasional. Capaian keberhasilan dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintahan daerah tersebut juga ditopang dengan peningkatan pencapaian indeks persepsi korupsi sebesar 6,5 poin pada Tahun 2015 yang menjadi lebih baik dari kondisi Tahun 2014 sebesar 3,7 poin.

Ketiga, dalam rangka meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pembangunan Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya untuk mengimplementasikan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat berbasis komputer dengan melibatkan kabupaten dan kota di seluruh Jawa Barat. Implementasi SIPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut juga dalam rangka memenuhi ketentuan tentang Penyelenggaraan Informasi Pembangunan Daerah kepada masyarakat dan stakeholders pembangunan di Jawa Barat, berdasarkan ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan upaya yang sungguh-sungguh dalam mewujudkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah telah mendapatkan respon yang positif dari masyarakat dan stakeholders pembangunan Jawa Barat yang terkait.

Hal tersebut dicerminkan dengan diperolehnya berbagai penghargaan pada tingkatan nasional dalam pelayanan publik seperti: Anugerah Media Humas Peringkat I (pertama) kategori pelayanan informasi publik melalui website, Anugerah Media Humas Peringkat I (pertama) kategori Advetorial, dan juara umum Anugerah Media Humas Tahun 2015. Selain itu, capaian keberhasilan dalam mewujudkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, tercermin melalui pencapaian Indeks Skala Komunikasi Organisasi Pemerintahan sebesar 2,74 poin dan Indeks Skala Kepuasan Masyarakat sebesar 3 poin yang memberikan gambaran kondisi yang baik.

### **(3) Pelayanan Dasar**

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat melalui pelayanan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Pencapaian keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam peningkatan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur pada Tahun 2015, ditunjukkan dalam pencapaian beberapa keberhasilan, sebagai berikut:

**Pertama**, melalui bidang pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan upaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan di seluruh Jawa Barat melalui pemenuhan alokasi pendanaan pendidikan sebesar 20% dari total APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan ketentuan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang digunakan berbagai peruntukan penting dan mendasar, yaitu : (1) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk penyelenggaraan layanan Pendidikan Dasar dan Menengah bagi sekolah negeri maupun swasta. (2) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) bagi SMP/MTs, SMA/MA dan SMK negeri maupun swasta. (3) Peningkatan kualitas dan kesejahteraan bagi tenaga pendidik dan kependidikan sekolah negeri maupun swasta.

Capaian keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang pendidikan dicerminkan dari pencapaian peningkatan Indeks Pendidikan dari 59.26 poin pada Tahun 2014 menjadi 60.45 poin pada Tahun 2015; pencapaian peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 7,71 tahun pada Tahun 2014 menjadi 7,76 tahun pada Tahun 2015; pencapaian peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar tahun 2014-2015 hingga mencapai 109.83%; pencapaian peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama Tahun 2014-2015 hingga mencapai 98.91%; pencapaian peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang Sekolah Menengah Atas Tahun 2014-2015 hingga mencapai 67.58%.

**Kedua**, melalui bidang Kesehatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan upaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan di seluruh Jawa Barat melalui pembangunan sarana di RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat, mencakup pembangunan Gedung Utama Pelayanan, Perawatan, Perkantoran dan Perparkiran; Gedung Radioterapi; serta alat-alat kesehatan yang menunjang pelayanan kesehatan, baik di Gawat Darurat, Rawat Jalan, Rawat Inap, ICCU, ICU, HCU, Stoke Unit, Bedah Central, Kebidanan dan Perinatologi, dan penunjang medic, serta pengadaan obat dan bahan penunjang medis serta pelayanan kesehatan. RSUD Al Ihsan menyediakan pelayanan kesehatan bagi pasien tidak mampu yang tidak dijamin oleh program BPJS dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara langsung. Selain itu, telah dipenuhi penempatan 1.004 tenaga kesehatan PTT Provinsi yang terdiri dari 98 orang dokter umum/dokter gigi, 756 orang bidan, 6 orang dokter spesialis, dan 144 orang tenaga kesehatan lainnya.

Capaian keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang kesehatan dicerminkan dari pencapaian Indeks Kesehatan dari 80.35 poin pada Tahun 2014, menjadi 80.80 poin pada Tahun 2015, Angka Harapan Hidup (AHH) dari 72.23 tahun pada Tahun 2014 menjadi 72.52 tahun pada Tahun 2015.

**Ketiga**, melalui pembangunan infrastruktur yang merupakan kegiatan Bidang Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan upaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Upaya tersebut dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan menerbitkan Surat Keputusan Gubernur No 500 Tahun 2014 tentang Fokus Pelaksanaan pembangunan di Jawa Barat, yang terdiri atas 37 Program Dan Kegiatan Unggulan Provinsi Jawa Barat. Beberapa fokus yang terkait dengan bidang pekerjaan umum di antaranya: peningkatan infrastruktur desa dan perdesaan, rehabilitasi 100.000 unit rumah rakyat miskin, cetak sawah baru 100.000 ha, perbaikan dan pengelolaan jaringan irigasi terpadu, pembangunan tol dan jalan lintas cepat, persiapan pembangunan *aerotropolis* (Bandara Internasional Jawa Barat Dan Aerocity Kertajati).

Capaian keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang pekerjaan umum ditunjukkan dengan meningkatnya Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi menjadi sebesar 69,65%, Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik sebesar 65,03%, Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan sebesar 65,65%, Cakupan Pelayanan Air Minum sebesar 67,13%, Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (kondisi baik dan sedang) sebesar 97,80% di Tahun 2015, Tingkat kemantapan jalan tersebut di antaranya merupakan hasil dari pembangunan jalan sepanjang 3,91 km, peningkatan jalan sepanjang 28,24 km, penggantian jembatan sepanjang 112,30 m, rehabilitasi jalan sepanjang 102,69 km, rehabilitasi jembatan sepanjang 312,10 m dan pemeliharaan jalan pada semua jaringan jalan Provinsi sepanjang 2.198,19 km. Di samping itu Pemerintah Provinsi telah membantu pemerintah Kabupaten/Kota dalam memperbaiki jalan milik Kabupaten/Kota,

serta membangun dan memperbaiki 23 jembatan gantung. Prestasi yang sangat luar biasa yang telah ditunggu oleh masyarakat Jawa Barat sepanjang 54 Tahun ini adalah diselesaikannya pembangunan dan penggenangan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang yang diperkirakan akan sangat berdampak signifikan dan positif pada pertumbuhan ekonomi kemasyarakatan.

#### **(4) Daya Saing Daerah**

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan daya saing daerah dalam rangka mewujudkan kemajuan dan keunggulan Provinsi Jawa Barat, melalui berbagai langkah antara lain: (1) menarik modal luar negeri, swasta dan modal publik, melalui komunikasi dengan investor dan lembaga keuangan, (2) mendorong penciptaan tenaga kerja terampil, menciptakan lingkungan yang kondusif dan menyediakan pasar kerja dengan program penyediaan 2.000.000 lapangan kerja, (3) menarik aktivitas inovasi dan ilmu pengetahuan melalui pendirian Badan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK serta kerjasama dengan Perguruan Tinggi.

Capaian keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dalam peningkatan daya saing daerah ditunjukkan dengan capaian realisasi investasi di Jawa Barat pada Tahun 2015 dengan nilai Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 71,7 triliun rupiah; nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 49,8 triliun rupiah; nilai investasi PMA-PMDN sebesar 121,5 triliun rupiah berdasarkan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB); Nilai Investasi (PMTB) atas dasar harga berlaku sebesar 396,36 triliun Rupiah; dan laju Pertumbuhan Investasi (PMTB) atas dasar harga berlaku sebesar 0.95%.

Capaian keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dalam peningkatan daya saing daerah ditopang oleh kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal PMA/PMDN melalui pembinaan dan pemantauan PMA/PMDN di 27 Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Promosi dan Kerjasama Investasi guna tersampainya informasi potensi investasi Jawa Barat kepada 500 calon investor di dalam maupun luar negeri, *opinion makers* dan *stakeholders* lainnya untuk meningkatkan minat investasi di Jawa Barat. Di samping itu, dalam rangka peningkatan daya saing daerah telah diwujudkan berbagai **Inovasi Daerah Unggulan Jawa Barat**, di antaranya:

- 1) Inovasi di bidang Pelayanan Publik meliputi :
  - a. Pengembangan Sistem RKPD Jabar *Online 2101 (e-planning)* dan *e-monev* dalam rangka monitoring, evaluasi, dan perencanaan tahunan pembangunan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi;
  - b. Pengelolaan Satu Data Pembangunan Jawa Barat secara teintegrasi dan berbasis on line;
  - c. Penyusunan Basis Data Kemiskinan melalui Aplikasi Kilometer Nol (KM-0) Pro Poor, sehingga terwujud sinergitas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat;

- d. Pengembangan Sistem Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah (ATISISBADA) dalam Pengelolaan Barang dan Aset Daerah, yang menjadikan Jawa Barat memperoleh predikat WTP dalam pengelolaan aset/barang milik daerah;
  - e. Penerapan e-Procurement atau Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Nasional. Sampai dengan Tahun 2015 telah beroperasi 21 LPSE sistem provider, sedangkan 7 kabupaten/kota sebagai agency pengguna LPSE Provinsi Jawa Barat.
  - f. Perijinan Online, merupakan aplikasi yang bisa di download melalui handphone yang memberi kemudahan bagi masyarakat/ pengusaha untuk mengajukan perijinan, sehingga tidak harus datang langsung ke kantor BPMPT.
  - g. Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) ISO 27001:2005 pada penyelenggaraan LPSE, yang meliputi: registrasi, verifikasi, training, tendering, helpdesk, data center dan technical support;
- 2) Inovasi di Bidang Pengembangan Wilayah melalui Pembentukan Badan Pengembangan Jawa Barat Bagian Selatan dan Badan Pengembangan Jawa Barat Bagian Utara serta Pengembangan 3 (tiga) Metropolitan, yaitu: Metropolitan BODEBEKKARPUR, Metropolitan Bandung Raya, Metropolitan Cirebon Raya, dan 3 (tiga) Pusat Pertumbuhan di Provinsi Jawa Barat;
  - 3) Inovasi di Bidang Keuangan Daerah, melalui Inisiasi Rencana Penerbitan Obligasi Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 4 triliun sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur. Inisiasi ini merupakan yang pertama dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia, bahkan Jawa Barat telah diberikan peringkat AA- oleh Lembaga Pemeringkat Nasional dalam kaitannya dengan kemampuan memenuhi kewajiban sebagai obligor;
  - 4) Inisiasi Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur Strategis Nasional, melalui Pembangunan Aerotropolis (Bandara Internasional Jawa Barat dan Aerocity Kertajati).
  - 5) Inovasi Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ditunjukkan dengan pemberian skema kredit tanpa agunan dengan bunga murah/terjangkau kepada usaha mikro dan kecil, yang dinamakan Kredit Cinta Rakyat (KCR). Sejak Tahun 2011 hingga Desember 2015 telah dialokasikan dana sebesar 385 milyar rupiah. Jumlah Penerima Manfaat KCR sebanyak 13.396 orang yang memiliki usaha mikro dan kecil dan menyerap tenaga kerja sebanyak 31.000 orang;
  - 6) Inovasi bidang Pendidikan melalui pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) bagi SMP/MTs sebanyak 413 ruang, untuk meningkatkan daya tampung sekolah.

#### **(5) Posisi Jawa Barat Dalam Konstelasi Nasional**

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menempatkan posisi Provinsi Jawa Barat dalam konstelasi nasional secara signifikan, strategis dan penting untuk mencerminkan tentang

kemajuan dan keunggulan Provinsi Jawa Barat terhadap provinsi lain di Indonesia. Penempatan posisi Provinsi Jawa Barat dalam konstelasi nasional secara signifikan, strategis dan penting dipetakan berdasarkan capaian kinerja pembangunan dan raihan berbagai prestasi atau penghargaan pada tingkatan nasional.

#### 1) Kinerja pembangunan

Kinerja pembangunan Provinsi Jawa Barat dapat digambarkan pula dalam konstelasi Nasional adalah sebagai berikut :

- a. Jawa Barat memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 12,95% berada di peringkat 3 setelah DKI Jakarta dan Jawa Timur.
- b. Realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Jawa Barat menempati peringkat ke-1 secara nasional, dengan nilai investasi PMA Jawa Barat mencapai 6.562 juta US\$ atau setara dengan 23 persen dari total realisasi investasi PMA Indonesia.
- c. Realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Jawa Barat menduduki peringkat ke-2 dibawah Jawa Timur dengan nilai investasi PMDN Rp. 18.726,9 Milyar. Tingginya nilai investasi PMDN Jawa Barat mencerminkan iklim investasi yang semakin membaik.
- d. Jumlah koperasi aktif di Jawa Barat sebanyak 15.633 unit berada di posisi ke 3 setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah.
- e. Provinsi Jawa Barat berkontribusi sebesar 16,44 persen terhadap produksi padi (GKG) Nasional, terbesar kedua setelah Provinsi Jawa Timur yaitu 11,64 juta ton.
- f. Provinsi Jawa Barat juga merupakan daerah Produsen utama daging sapi (73,5 ribu ton atau 13,61% terhadap produksi daging sapi Indonesia) dan daging ayam (547,6 ribu ton atau 35,91% terhadap produksi daging ayam Indonesia).
- g. Untuk produksi perikanan budidaya, Jawa Barat menempati peringkat ke 1 di Indonesia. Produksi perikanan budidaya kolam menghasilkan 424,23 ribu ton, budidaya jaring apung 179,02 ribu ton dan budidaya sawah 27,07 ribu ton.
- h. Pemilik sertifikat tenaga terampil di perusahaan konstruksi secara nasional 31,15% tinggal di Jawa Barat, yaitu sebanyak 52.816 orang dari 169.549 orang di Indonesia.
- i. Perumnas membangun rumah sebanyak 3.008 unit setara dengan 22.81% dari total unit rumah yang dibangun di Indonesia. Sementara itu Jawa Barat juga merupakan Provinsi yang merealisasikan pembangunan rumah susun sederhana dan rumah siap huni sebanyak 1.588 unit dari 6.045 unit rumah susun di seluruh Indonesia.

#### 2) Penghargaan Tingkat Nasional

Keberhasilan pembangunan Jawa Barat selama Tahun 2015 ditunjukkan juga oleh raihan prestasi dan penghargaan Tingkat Nasional, sebagai berikut :



- (1) *Government Award* 2015 "Peduli Lingkungan" versi *Sindo weekly Magazine*, yang diterima oleh Gubernur Jawa Barat. Jakarta, Kamis 19 Maret 2015.
- (2) Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014, yang diserahkan oleh BPK RI kepada Gubernur Jawa Barat Di Ruang Sidang DPRD Provinsi Jawa Barat, Senin 8 juni 2015.
- (3) BKN *Award*, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperoleh penghargaan BKN *Award* kategori Implementasi Penilaian Kinerja Terbaik, Pengelola Kepegawaian terbaik dan BKD Provinsi Inovatif. Yang diterima oleh Kepala BKD Provinsi Jawa Barat Di Hotel Grand Sahid jaya Jakarta, Rabu 10 Juni 2015.
- (4) Penganugerahan Indonesia *Attractiveness Index*. Jawa Barat sebagai salah satu pemenang Indonesia *Attractiveness Index* dengan indek total 79,44. Penghargaan diterma oleh Plt. Sekda Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa Di Hotel Mulia Senayan Jakarta, Jumat 12 Juni 2015.
- (5) Penghargaan KNPI *Award*. Gubernur Jawa Barat mendapatkan Penghargaan KNPI *Award* pada acara Rakernas KNPI Di Sheraton Media Hotel Jakarta, Jumat 12 Juni 2015.
- (6) Penghargaan Kepala Daerah Inovatif 2015 kategori *Good Governance*, yang diterima oleh Gubernur Jawa Barat di Kota Makasar Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat 31 Juli 2015.
- (7) Penghargaan Anugerah IPTEK Pemerintah Provinsi kategori Penguatan Jaringan SIDA (Budhipura) dari Menristek RI pada Hari Teknologi Nasional ke 20 tahun 2015 di Jakarta 10 Agustus 2015.
- (8) Penghargaan Anugerah Bintang Jasa Utama dari presiden RI bentuk apresiasi atas kerja kerasnya dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM di Jawa Barat di Jakarta, 13 Agustus 2015.
- (9) Penghargaan Dari Kwarnas, Yg Diserahkan Oleh Presiden RI kepada Gubernur Jawa Barat Pada Peringatan Hari Pramuka Ke 54 Tingkat Nasional Di Buper Cibubur Jakarta Timur, Minggu 16 Agust 2015.
- (10) Penghargaan Pembina K3 Nasional Tahun 2015, di ruang Birawa Hotel Bidakara, jl. Jend. Gatot Subroto Kav.71-73, Jakarta Selatan, pada Kamis 10 September 2015 malam. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Hanif Dhakiri kepada Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar.
- (11) *Smart Nation Award* 2015. Pemerintah Provinsi Jawa Barat meraih juara pertama kategori provinsi berukuran besar dalam *Indonesia Smart Nation Award* (ISNA) 2015 dari *Citi Asia, Inc*, Bertempat di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, pada Selasa (20/10/2015). Yang diterima oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat Dr. Dudi Sudradjat Abdurachim, yang mewakili Pemprov Jawa Barat.
- (12) Tokoh Inspirator Pemuda Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) dianugerahi sebagai tokoh inspirator pemuda Jawa Barat. Penghargaan diterima Aher usai

- menjadi Inspektur Upacara peringatan hari Sumpah Pemuda Tingkat Jawa Barat di halaman Gedung Sate Bandung, Rabu (28/10).
- (13) Penghargaan Nugra Jasadarma Pustaloka yang di berikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional Sri Sularsih kepada Sekretaris Daerah Prov Jabar Iwa Karniwa mewakili Gubernur Jabar di Gedung Smesco SME Tower Jl. Gatot Soebroto Jakarta, Kamis 29 Okt 2015. Penghargaan ini di berikan atas dedikasi dan sumbangsihnya terhadap pengembangan perpustakaan dan minat baca di Indonesia.
  - (14) "Anugerah Kawistara 2015", Kategori Instansi Jabar Yang Peduli Terhadap Kebahasaan Dan Kesusastraan, yang diterima oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Di Hotel Harris Bandung, Rabu 4 November 2015.
  - (15) *National Procurement Award* 2015. Gubernur Jawa Barat menerima penghargaan National Procurement Award 2015 dari LKPP kategori " Kepemimpinan dalam transformasi pengadaan secara elektronik " bertempat Di Balai SDRM Jakarta, Selasa 10 November 2015.
  - (16) Anugerah Media Humas Peringkat pertama kategori Laporan Kerja Humas Di Surabaya Jawa Timur, Rabu 18 November 2015.
  - (17) Anugerah Media Humas Peringkat pertama kategori pelayanan informasi publik melalui website Di Surabaya Jawa Timur, Rabu 18 November 2015.
  - (18) Anugerah Media Humas Peringkat pertama kategori Advetorial Di Surabaya Jawa Timur, Rabu 18 November 2015.
  - (19) Juara Umum Anugerah Media Humas Tahun 2015, Penghargaan diserahkan oleh Menteri Komunikasi & Informasi RI Di Surabaya Jawa Timur, Rabu 18 November 2015.
  - (20) *Regional Marketing Award* 2015 dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan firma pemasaran ternama, Markplus, di Jakarta, Kamis (10/12/2015) kategori *Gold Champion* yang diberikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada Gubernur Jawa Barat.
  - (21) Penghargaan dalam akuntabilitas kinerja Tahun 2015 dari menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia Prof. Dr. H. Yuddy Chrisnandi, ME yang diserahkan oleh Wakil Presiden RI dan diterima oleh Sekda Provinsi Jawa Barat, di istana wakil presiden djalan kebon sirih jakarta, selasa 15 des 2015.
  - (22) Penghargaan Wahana Tata Nugraha Wiratama bidang perhubungan, yaitu penataan transportasi publik dengan baik yang diserahkan oleh Presiden RI kepada Gubernur Jawa Barat di Istana Negara Jakarta 23 Desember 2015

Tantangan dan permasalahan yang terjadi selama kurun waktu 2015, merupakan bagian dari proses pembangunan yang perlu terus untuk diselesaikan, sehingga di masa mendatang perwujudan Visi dan Misi Jawa Barat dapat lebih berkualitas yang sekaligus merupakan *Lesson*

*Learned* bagi berbagai pihak sebagai upaya cepat untuk meningkatkan kesejahteraan dalam rangka mewujudkan masyarakat Jawa Barat yang Maju dan Sejahtera untuk semua.

Berdasarkan capaian dan tantangan pelaksanaan pembangunan Tahun 2015, untuk lebih meningkatkan kinerja pembangunan Jawa Barat Tahun 2016, diperlukan hal penting sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan hasil pembangunan yang dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat, maka pelaksanaan pekerjaan dan penyerapan anggaran agar dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat, sehingga menghindari kondisi menumpuknya tagihan pembayaran pekerjaan pada akhir Triwulan IV.
- 2) Pentingnya koordinasi yang efektif, antar OPD/Biro dan Pemerintah Kabupaten/kota serta Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pembangunan.
- 3) Diperlukan perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi dan terpadu guna mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih mudah dapat tercapai.
- 4) Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar wilayah.